



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I TAHUN 2025

Balai Besar KIPM Makassar

Jalan Dakota Nomor 24 Makassar 90242
Telepon: (0411) 4813452, 4813539, 555120, Faksimile: (0411) 555159
Surel: bppmhkp.makassar@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (Balai Besar KIPM Makassar) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Balai Besar KIPM Makassar.

Di samping itu, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Makassar, 21 Juli 2025

Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar,



Rahayu
Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
NIP. 197705032006042002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
- VI. Lampiran dokumen pendukung



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**

JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM <https://www.kkp.go.id/bkipm/bkipmmakassar> SUREL bkipmmakassar@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester I Tahun 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 21 Juli 2025

Pt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar,



Sri Rahayu Setyaningsih
Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
NIP. 197705032006042002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.000.116.000,- atau mencapai 28,97 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp3.452.430.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.000.116.000,- atau mencapai 28,97 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp4.433.107.081,- atau mencapai 37,32 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.879.526.000,-. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp3.293.895.851,- atau 47,17 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp. 6.983.259.000,-, Belanja Barang sebesar Rp1.139.211.230,- atau 23,27 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp.4.896.267.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 disajikan dalam Tabel 1.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	2025		2024	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
A. Pendapatan Negara Dan Hibah				
I. Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	0,
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.452.430.000,	1.000.116.000,	3.627.065.000,	2.197.160.700,
III. Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3.452.430.000,	1.000.116.000,	3.627.065.000,	2.197.160.700,
B. Belanja Negara	0,	0,	0,	0,
I. Belanja Pemerintah Pusat	11.879.526.000,	4.433.107.081,	12.360.690.000,	6.130.827.260,
1. Belanja Pegawai	6.983.259.000,	3.293.895.851,	6.337.208.000,	4.363.811.169,
2. Belanja Barang	4.896.267.000,	1.139.211.230,	6.023.482.000,	1.767.016.091,
II. Transfer ke Daerah	0,	0,	0,	0,
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	11.879.526.000,	4.433.107.081,	12.360.690.000,	6.130.827.260,

NERACA

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.512.634.004,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp74.988.077,- ; dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp26.437.645.927,-. Nilai Kewajiban sebesar Rp457.744.041,- dan Ekuitas sebesar Rp26.054.889.963,-. Ringkasan Neraca pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan dalam Tabel 2.

Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR	74.988.077	80.272.481	(5.284.404)	(6,58)
ASET TETAP	26.437.645.927	26.862.366.053	(1.669.360)	(1,58)
ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	26.512.634.004	26.942.638.534	(5.284.404)	(1,60)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	457.744.041	102.748.861	354.995.180	345,50
JUMLAH KEWAJIBAN	457.744.041	102.748.861	354.995.180	345,50
EKUITAS				
EKUITAS	26.054.889.963	26.839.889.673	(360.279.584)	(2,92)
JUMLAH EKUITAS	26.054.889.963	26.839.889.673	(360.279.584)	(2,92)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26.512.634.004	26.942.638.534	(6.953.764)	(1,60)

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp999.931.000,- sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp5.330.022.417,- sehingga terdapat Defisit/Surplus dari Kegiatan Operasional senilai (Rp4.330.091.417,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar (Rp1.484.360,-) dan Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit/Surplus-LO sebesar (Rp4.331.575.777,-)

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 disajikan dalam Tabel 3.

Ringkasan Laporan Operasional Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	999.931.000,	2.180.070.000,	(1.180.139.000,)	(54,133)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	3.585.538.992,	3.995.387.106,	(409.848.114,)	(10,258)
Beban Persediaan	141.112.436,	180.199.010,	(39.086.574,)	(21,691)
Beban Barang dan Jasa	970.429.691,	1.216.298.454,	(245.868.763,)	(20,215)
Beban Pemeliharaan	152.237.573,	257.498.010,	(105.260.437,)	(40,878)
Beban Perjalanan Dinas	57.652.959,	271.340.154,	(213.687.195,)	(78,753)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	423.050.766,	664.541.954,	(664.541.954,)	(100,)
JUMLAH BEBAN	5.330.022.417,	6.585.264.688,	(1.678.293.037,)	(25,486)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4.330.091.417,)	(4.405.194.688,)	498.154.037,	(11,308)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset	(1.669.360)	0	(1.669.360)	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185.000	0	185.000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4.331.575.777)	(4.405.194.688,)	496.669.677	(11,27)
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4.331.575.777)	(4.405.194.688,)	496.669.677	(11,27)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 26.839.889.673,- ditambah Defisit/Surplus-LO sebesar (Rp.4.331.575.777,-) kemudian ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp.3.546.576.067,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.26.054.889.963,-. Ekuitas ini mengalami penurunan sebesar (Rp.784.999.710,-) dari nilai Ekuitas Awal.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 disajikan dalam Tabel 4.

Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	26.839.889.673,	36.230.547.829,	(9.390.658.156,)	(25,92)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.331.575.777)	(4.405.194.688,)	73.618.911	(1,67)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0,	85.454,	(85.454,)	(100,)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0,	0,	0,	0,
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,	0,	0,	0,
SELISIH REVALUASI ASET	0,	0,	0,	0,
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0,	0,	0,	0,
LAIN-LAIN	0,	85.454,	(85.454,)	(100,)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3.546.576.067,	3.982.337.260,	(435.761.193,)	(10,94)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(784.999.710,)	(422.771.974,)	(362.227.736)	85,68
EKUITAS AKHIR	26.054.889.963	35.807.775.855,	(9.752.885.892)	(27,24)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. Pendapatan Negara Dan Hibah				
I. Pendapatan Perpajakan				
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.452.430.000,	1.000.116.000,	28,97	2.197.160.700
1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.452.430.000,	1.000.116.000,	28,97	2.197.160.700
III. Pendapatan Hibah	0,	0,	0	0,
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3.452.430.000,	1.000.116.000,	28,97	2.197.160.700
B. Belanja Negara				
I. Belanja Pemerintah Pusat	11.879.526.000,	4.433.107.081,	37,32	6.130.827.260
1. Belanja Pegawai	6.983.259.000,	3.293.895.851,	47,17	4.363.811.169
2. Belanja Barang	4.896.267.000,	1.139.211.230,	23,27	1.767.016.091
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	11.879.526.000,	4.433.107.081,	37,32	6.130.827.260

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuanga

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NERACA
PER 30 Juni 2025 DAN 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	21.000.000,	0	21.000.000	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0,	27.200.000	(27.200.000)	(100,00)
Persediaan	53.988.077,	53.072.481	915.596	1,73
JUMLAH ASET LANCAR	74.988.077,	80.272.481	(5.284.404)	(6,58)
ASET TETAP				
Tanah	20.345.060.000,	20.345.060.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	18.231.941.747,	18.809.622.744	(577.680.997)	(3,07)
Gedung dan Bangunan	6.115.277.600,	6.115.277.600	0	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.041.650,	217.041.650	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	74.086.555,	74.086.555	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(18.545.761.625,)	(18.698.722.496)	152.960.871	(0,82)
JUMLAH ASET TETAP	26.437.645.927,	26.862.366.053	(424.720.126)	(1,58)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	0	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	0	(0)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	26.512.634.004,	26.942.638.534	(430.004.530)	(1,60)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	436.744.041,	102.748.861	333.995.180	325,06
Uang Muka dari KPPN	21.000.000,	0	21.000.000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	457.744.041,	102.748.861	354.995.180	345,50
JUMLAH KEWAJIBAN	457.744.041,	102.748.861	354.995.180	345,50
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	26.054.889.963	26.839.889.673	(784.999.710)	(2,92)
JUMLAH EKUITAS	26.054.889.963	26.839.889.673	(784.999.710)	(2,92)
JUMLAH EKUITAS	26.054.889.963	26.839.889.673	(784.999.710))	(2,92)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26.512.634.004	26.942.638.534	(430.004.530)	(1,60)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	999.931.000,	2.180.070.000,	(1.180.139.000,)	(54,133)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	3.585.538.992,	3.995.387.106,	(409.848.114,)	(10,258)
Beban Persediaan	141.112.436,	180.199.010,	(39.086.574,)	(21,691)
Beban Barang dan Jasa	970.429.691,	1.216.298.454,	(245.868.763,)	(20,215)
Beban Pemeliharaan	152.237.573,	257.498.010,	(105.260.437,)	(40,878)
Beban Perjalanan Dinas	57.652.959,	271.340.154,	(213.687.195,)	(78,753)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	423.050.766,	664.541.954,	(241.491.188,)	(36,339,)
JUMLAH BEBAN	5.330.022.417,	6.585.264.688,	(1.255.242.271,)	(19,061)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4.330.091.417,)	(4.405.194.688,)	75.103.271,	(1,705)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(1.669.360)	0	185.000,	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185.000	0	185.000,	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4.331.575.777)	(4.405.194.688,)	73.618.911	(1,671)
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4.331.575.777)	(4.405.194.688,)	73.618.911	(1,671)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	26.839.889.673,	36.230.547.829,	(9.390.658.156,)	(25,92)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.331.575.777)	(4.405.194.688,)	73.618.911,	(1,67)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0,	85.454,	(85.454,)	(100,)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0,	0,	0,	0,
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,	0,	0,	0,
SELISIH REVALUASI ASET	0,	0,	0,	0,
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0,	0,	0,	0,
LAIN-LAIN	0,	85.454,	(85.454,)	(100,)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3.546.576.067,	3.982.337.260,	(435.761.193,)	(10,94)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(784.999.710,)	(422.771.974,)	(362.227.736,)	(85,68)
EKUITAS AKHIR	26.054.889.963,	35.807.775.855,	(9.752.885.892,)	(27,24)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Besar KIPM Makassar

**Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis**

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tahapan dalam perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yakni:

- (1) penyusunan rencana,
- (2) penetapan rencana,
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia,
- (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan,
- (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
- (6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,

(7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa,

(8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

(9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk :

(1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan

(2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan. Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Keterkaitan fungsi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/ pengendalian (official control) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (traceability), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius., atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor. Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun

kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BPPMHKP dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BPPMHKP dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

Faktor-faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2020 - 2024.

Visi Presiden Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diamanatkan, BKIPM BPPMHKP melaksanakan 3 dari 4 misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu :

“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap

perekonomian nasional;

“Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;

“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, yaitu :

Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;

Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;

Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Balai Besar KIPM Makassar sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2020-2024, terdiri dari :

Sasaran Strategis 1. Industrialisasi KP yang berdaya saing;

Sasaran Strategis 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;

Sasaran Strategis 3. Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar;

Sasaran Strategis 4. Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif;

Sasaran Strategis 5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan empat perspektif yaitu stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Arah kebijakan dan strategi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan 6 tujuan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan

hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional;

Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional;

Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI;

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan

prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik;

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian;

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data;

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai Besar KIPM Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Balai Besar KIPM Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Balai Besar KIPM Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Balai Besar KIPM Makassar. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Aset Tetap

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan

masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Balai Besar KIPM Makassar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sampai dengan Revisi ke-4 dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025
Tabel 5

Kode	Uraian	Tahun 2025	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi 4
51 Belanja Pegawai		6.983.259.000	6.983.259.000
032.13.WA.3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	6.983.259.000	6.983.259.000
52 Belanja Barang dan Jasa		4.896.267.000	4.896.267.000
032.13.EC.3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	375.000.000	375.000.000
032.13.EC.7010	Manajemen Mutu	178.000.000	178.000.000
032.13.WA.3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	4.343.267.000	4.343.267.000
Penerimaan		3.452.430.000	3.452.430.000
	PNBP	3.452.430.000	3.452.430.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp1.000.116.000,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.000.116.000,- atau mencapai 28,97 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.452.430.000,-. Adapun realisasi pendapatan Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 dapat dilihat pada table 6 berikut:

Tabel.6

Pendapatan Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3.452.430.000,	999.931.000,	28,96
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	3.452.430.000,	999.931.000,	28,96
Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	185.000,	0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0,	185.000,	Infinity
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3.452.430.000,	1.000.116.000,	28,97
JUMLAH PENDAPATAN	3.452.430.000,	1.000.116.000,	28,97

Berikut penjelasan Pendapatan Negara Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2025:

Pendapatan pengujian , sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya sebesar Rp999.931.000,-. pendapatan ini merupakan pendapatan fungsional dari Balai Besar KIPM Makassar berupa pengujian laboratorium dan sertifikat ekspor komoditi non hidup;

Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp185.000,-. Pendapatan ini merupakan pengembalian 1 orang pegawai atas pembayaran tunjangan umum yang telah dibayarkan dibulan desember 2024 dimana pegawai tersebut seharusnya dibayarkan tunjangan fungsional sehingga dibulan januari telah dibayarkan kekurangan pembayaran tunjangan fungsional atas pegawai tersebut.

Realisasi PNBPN tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- dan Rp999.931.000,-. terdapat Penurunan sebesar 54,49 persen dari realisasi PNBPN tahun 2024 sebesar Rp.2.197.160.700,- .Hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya lagi penarikan biaya organoleptik stuffing karena sudah dialihkan ke Badan Karantina Indonesia.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I tahun 2025 dan 2024:

Tabel.7

Uraian	2025	2024	Naik/ Turun (%)
Pendapatan PNB	999.931.000	2.197.160.700	54,49
Pendapatan Lain-lain	185.000	0	-
Jumlah	1.000.116.000	2.197.160.700	54,48

Nilai Pendapatan pada LRA berbeda dengan pendapatan pada LO. Realisasi pendapatan pada LRA sebesar Rp.1.000.116.000,- sedangkan Realisasi pendapatan pada laporan operasional adalah sebesar Rp.999.931.000,- terdapat selisih sebesar Rp185.000,- ini disebabkan karena laporan operasional tidak memperhitungkan Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp.185.000,- yang terdapat pada LRA.

Berikut tabel perbandingan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional.

Uraian	LRA	LO	Selisih
Realisasi Pendapatan	1.000.116.000	999.931.000	185.000

Perbedaan nilai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional yaitu Pada Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai seluruh penerimaan negara pada Balai Besar KIPM Makassar sedangkan pada Laporan Operasional, Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan laporan kegiatan operasional dan laporan non kegiatan operasional. Selisih sebesar Rp17.090.700,00 merupakan pendapatan non kegiatan operasional dari Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu.

**Realisasi
Belanja
Rp4.433.107.081,-**

B.2 Belanja

Realisasi belanja semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp.4.433.107.081,- atau 37,32 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.11.879.526.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel.8
Realisasi Belanja Semester I Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA			% REALISASI
		BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
BELANJA PEGAWAI					
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6.983.259.000,	3.293.895.851,	0,	3.293.895.851,	47,17
BELANJA BARANG					
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4.896.267.000,	1.139.211.230,	0,	1.139.211.230,	23,27
JUMLAH BELANJA	11.879.526.000,	4.433.107.081,	0,	4.433.107.081,	37,32

Realisasi anggaran semester I tahun 2025 dan 2024 masing-masing Rp. 4.433.107.081,- dan Rp6.130.827.260,- . Realisasi belanja tahun 2025 mengalami Penurunan dibandingkan tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan realisasi belanja pegawai disebabkan adanya peralihan pegawai yang mutasi ke Badan Karantina Indonesia serta adanya penurunan anggaran untuk belanja Barang.

Berikut adalah Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024:

Tabel.9
Perbandingan realisasi belanja Semester I Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
BELANJA PEGAWAI	3.293.895.851	4.363.811.169	68,86
BELANJA BARANG	1.139.211.230	1.767.016.091	29,34
JUMLAH	4.433.107.081	6.130.827.260	49,6

Dari tabel diatas terdapat penurunan realisasi belanja pegawai sebesar 49,6 persen pada tahun 2025 jika dibandingkan tahun 2024 hal tersebut disebabkan oleh adanya peralihan pegawai yang mutasi ke Badan Karantina Indonesia sebanyak 59 pegawai terdiri dari 1 orang struktural, 44 orang fungsional PHPI, 10 orang Fungsional Inspektur Mutu, 1 orang

Fungsional Pranata Komputer, 1 orang fungsional pranata keuangan serta 2 orang fungsional umum. Dan untuk belanja barang terdapat penurunan sebesar 29,34 persen.

Untuk penyajian belanja pada LRA dan penyajian beban pada LO Terdapat perbedaan nilai penyajian. Kebijakan Akuntansi terkait Beban dan Belanja, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp3.293.895.851,-*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp3.293.895.851,- atau 47,17 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp6.983.259.000,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.363.811.169,- maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.069.915.318,- atau 25 persen.

Turunnya realisasi belanja pegawai TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 disebabkan karena adanya diawal tahun 2024 terdapat peralihan pegawai yang mutasi ke Badan Karantina Indonesia sebanyak 59 pegawai terdiri dari 1 orang struktural, 44 orang fungsional PHPI, 10 orang Fungsional Inspektur Mutu, 1 orang Fungsional Pranata Komputer,

1 orang fungsional pranata keuangan serta 2 orang fungsional umum..

Adapun perbandingan pagu dan realisasi belanja pegawai TA 2025 dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA			% REALISASI
		BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
BELANJA PEGAWAI					
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2.767.166.000,	1.594.661.388	0,	1.594.661.388,	57,63
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK					
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	468.937.000,	0,	0,	0,	0,
Belanja Lembur					
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	243.842.000,	74.614.000,	0,	74.614.000,	30,6
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito					
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3.503.314.000,	1.624.620.463	0,	1.624.620.463,	46,37
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6.983.259.000,	3.293.895.851	0,	3.293.895.851,	47,17

Perbandingan antara realisasi belanja pegawai Semester I TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Perbandingan antara realisasi belanja pegawai Semester I TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/PENURUNAN	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.594.661.388	2.088.008.943	(493.347.555)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	-	-	-	-
Belanja Lembur	74.614.000	72.536.000	2.078.000	
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.624.620.463	2.203.266.226	(578.645.763)	
JUMLAH	3.293.895.851	4.363.811.169	(1.069.915.318)	

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp5.214.266.960,
-*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir tahun 2025 adalah sebesar Rp1.139.211.230,- atau 23,27 persen dari pagu anggaran Rp4.896.267.000,- yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.767.016.091,- maka realisasi belanja barang TA 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp627.804.861,- atau 36 persen..

Penurunan nilai realisasi belanja barang pada TA 2025 dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu terjadi karena ketersediaan pagu anggaran belanja barang juga menurun untuk TA 2025.

Adapun perbandingan pagu dan realisasi belanja barang TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA			% REALISASI
		BELANJA	PENGEMBANGAN BELANJA	BELANJA NETTO	
BELANJA BARANG					
Belanja Barang Operasional JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1.472.722.000,	479.671.320,	0,	479.671.320,	32,57
Belanja Barang Non Operasional JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	60.422.000,	7.346.000,	0,	7.346.000,	12,16
Belanja Barang Persediaan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	242.760.000,	31.890.145,	0,	31.890.145,	13,14
Belanja Jasa JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1.604.720.000,	413.860.332,	0,	413.860.332,	25,79
Belanja Pemeliharaan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	987.499.000,	148.790.474,	0,	148.790.474,	15,07
Belanja Perjalanan Dalam Negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	528.144.000,	57.652.959,	0,	57.652.959,	10,92
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4.896.267.000,	1.139.211.230,	0,	1.139.211.230,	23,27

Perbandingan antara realisasi belanja barang semester I TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 13 berikut:

Perbandingan antara realisasi belanja barang semester I
TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BELANJA BARANG				
Belanja Barang Operasional JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	479.671.320,	593.823.676,	(114.152.356,)	-19,22
Belanja Barang Non Operasional JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7.346.000,	26.484.951,	(19.138.951,)	-72,26
Belanja Barang Persediaan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	31.890.145,	107.049.617,	(75.159.472,)	-70,21
Belanja Jasa JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	413.860.332,	578.772.579,	(164.912.247,)	-28,49
Belanja Pemeliharaan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	148.790.474,	189.545.114,	(40.754.640,)	-21,5
Belanja Perjalanan Dalam Negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	57.652.959,	271.340.154,	(213.687.195,)	-78,75
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1.139.211.230,	1.767.016.091,	(627.804.861,)	-35,53